

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, Ibu kota sekaligus pusat pemerintahannya terletak di kotaandangan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sekitar 1.703 km persegi dan berpenduduk sekitar 232.587.00 jiwa pada tahun 2017. Dalam penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik, di butuhkan dari sektor publik adanya perubahan baik dalam berpikir maupun bertindak, terutama dengan meninggalkan paradigma lama yang berupa suatu bangunan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan berwawasan lokus tunggal yang berupa birokrasi pemerintahan.

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya tugas pengelolaan dak harus ditangani langsung oleh pemerintah sendiri. Khusus untuk kawasan cagar budaya pengelolaan dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Badan Pengelola ini dapat terdiri dari unsur pemerintah pusat dan/atau pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemahaman lebih jauh mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik mengacu pada pemahaman bahwa bukan hanya apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah saja yang harus baik, akan tetapi keseluruhan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan urusan yang terkait dengan masalah kepentingan publik juga harus mempunyai kapasitas yang memadai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Mahatir & Ishihara (1995) bahwa pemahaman lebih jauh mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik mengacu pada pemahaman bahwa bukan hanya apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan saja yang bai,akan tetapi keseluruhan *stakeholders* atau pemangku kepentingan dalam

Masyarakat lokal semakin menyadari pentingnya temuan fosil di lapangan bagi pengembangankawasan, meskipun demikian upaya-upaya untuk mendapatkan fosil dan menjualnya secara ilegal masih belum dapat dihentikan sepenuhnya. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar penduduknya adalah petani dengan kondisi ekonomi lemah. Masalah ini merupakan agenda penting dari pengelola karena harus menjalankan fungsi perlindungan terhadap cagar budaya serta mengembangkan dan memanfaatkannya secara maksimal sebagai sumber ilmu pengetahuan. Namun demikian, pengelola juga dituntut juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan yang perlu perlindungan khusus, terlebih lagi sesudah menjadi warisan budaya dunia.

Satu hal yang patut digaris bawahi dari konsep CBT (*Community Based Tourism*), yakni pemahaman bahwa CBT (*Community Based Tourism*) tidak hanya berada pada ruang lingkup bagaimana pariwisata dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, melainkan bagaimana pariwisata dapat memberikan kontribusi proses pengembangan masyarakat. konsep CBT (*Community Based Tourism*) dapat menjadi suatu strategi pengembangan masyarakat menggunakan pariwisata sebagai alat menguatkan kapasitas pengorganisasian masyarakat dalam mengelola sumberdaya pariwisata yang ada melalui partisipasi masyarakat secara langsung.

CBT (*Community Based Tourism*) erat kaitannya dengan adanya kepastian partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata yang ada. partisipasi masyarakat dalam CBT (*Community Based Tourism*) terdiri atas dua pesktif, yaitu partisipasi dalam proses penentuan atau pengambilan keputusan dan partisipasi yang terkait dengan pendistribusian keuntungan yang diterima oleh masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Oleh sebab itu pada dasarnya terdapat

---

menyelenggarakan urusan yang terkait dengan masalah kepentingan publik harus juga mempunyai kapasitas yang memadai.

tiga prinsip pokok dalam strategi atau upaya CBT (*Community Based Tourism*) yang meliputi beberapa aspek berikut ini Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, Adanya kepastian masyarakat lokal dalam menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan, Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dengan adanya keleluasaan daerah untuk mengatur segala aspek kehidupan yang ada di daerah seiring dengan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka pemerintah daerah sebagai pengelola daerah sangat di tuntut untuk memiliki daya inovasi, kreasi dan kreatifitas dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Dalam Undang - Undang No 11 Tahun 2010 menjelaskan Tentang Cagar Budaya bahwa, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Permuseuman terdapat pada pasal 1 menjelaskan bahwa Cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya

---

<sup>2</sup>Pandu. 2018. *Cagar Budaya Bercerita Pada Kita*. Online. <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>. diakses pada hari Sabtu, 12 November 2019 pukul 20.22.

sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.<sup>3</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang rencana tata ruang wilayah Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu kawasan dan ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala.<sup>4</sup> Pengembangan dan pemanfaatan potensi tersebut dapat berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan daerah lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang ada di daerah setempat melalui pengembangan potensi di setiap masing masing daerah tersebut.

Melihat kenyataannya sektor pariwisata ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, Pariwisata secara umum memiliki kontribusi terhadap lapangan kerja yang memiliki implikasi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebagai industri baru telah mendorong sektor ini tumbuh dan berkembang menjadi andalan dalam menambah pendapatan negara. Pariwisata adalah sektor yang penting dan mudah dapat menghasilkan devisa dibanding dengan banyak sektor lain, dan banyak negara berhasil memperoleh devisa dari pariwisata. Bagi Indonesia pariwisata sudah menghasilkan devisa 14 Triliun.

Tentu saja berbagai daerah pun memacu perkembangan daerahnya. Begitu pula menganalisa kemampuan pariwisata Indonesia untuk mengurangi utang luar negeri. Menyadari pentingnya pengembangan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, selain di perlukannya biaya yang tidak sedikit, perbaikan sana dan infrastruktur pengembangan pariwisata,

---

<sup>3</sup> [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id)

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah

transportasi, dan segala fasilitas pengunjung di tempat pariwisata juga menjadi perhatian khusus, terutama pemerintah daerah untuk menunjang pengembangan pariwisata.

Dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata, ada banyak sektor yang berperan dalam menggerakkan sektor tersebut terdiri dari berbagai kelompok kepentingan terhadap sektor pariwisata. Secara umum, berbagai pihak dapat di kelompokkan dalam tiga sektor yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Masyarakat disini adalah masyarakat umum yang memiliki minat terhadap destinasi, sebagai sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan model penggerak pariwisata, seperti kebudayaan termasuk ke dalam masyarakat tokoh - tokoh, intelektual, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan media massa. Selanjutnya, dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha yang bererak dalam bidang pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah terbagi dalam berbagai wilayah administratif, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Secara aturan serta regulasi yang mengatur mengenai sektor cagar budaya harus jelas dan mengikat semua pihak. Regulasi yang mengatur cagar budaya di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya didarat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karna memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agamadan kebudayaan melalui poses penerapan.<sup>5</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Permuseuman terdapat pada pasal 1 menjelaskan bahwa Cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang

---

<sup>5</sup>Undang - Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.<sup>6</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang rencana tata ruang wilayah Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu kawasan dan ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala.<sup>7</sup> Disebutkan juga bahwa pembangunan pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerintah berkesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.<sup>8</sup> Undang - undang Nomor 10 tahun 2009 disebutkan merupakan suatu landasan pengembangan pariwisata di Indonesia yang di rencanakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas daerah setempat, kerangka kepentingan nasional, strategi pengembangan pariwisata berdasarkan amanat undang - undang di atas adalah persoalan yang perlu di kembangkan secara serius karena kemampuan strategi itu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata secara strategis diharapkan dapat memunculkan efek ganda, yang bermanfaat pada pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pariwisata berpotensi akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) kedepannya.

---

<sup>6</sup> Pandu. 2018. Op.Cit

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah

<sup>8</sup> Undang - Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Kunjungan Wisata**

No	Kunjungan Wisata ke Benteng Madang Tahun	Jumlah
1	2016	1.253 orang
2	2017	1.561 orang
3	2018	2.154 orang

Sumber data dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

Benteng Madang merupakan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terus mengalami peningkatan pengunjung setiap tahunnya. Pada tahun 2016 yang berkunjung ke objek wisata Benteng Madang sebanyak 1.253 orang, kemudian berlanjut pada tahun 2017 bertambah 1.561 orang, dan pada tahun 2018 daya tarik wisata benteng madang mendatangkan wisatawan sebanyak 2.154 orang pertahun, pengunjung yang datang tidak hanya dari dalam daerah melainkan dari luar daerah, selain masyarakat yang berwisata, ada juga mahasiswa melakukan yang kunjungan untuk penelitian. Objek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat beragam, dari sejarah, retail, budaya, hingga kawasan alam.

Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa perlu adanya pengembangan terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena kegiatan tersebut dapat di jadikan suatu sumber penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal, sehingga peneliti mengambil judul **“Pengelolaan Pariwisata Cagar Budaya Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang di sebutkan sebelumnya maka dapat di rumuskan masalah dalam pengelolaan pariwisata cagar budaya berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Apa saja pengelolaan pariwisata cagar budaya berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi pengelola pariwisata cagar budaya berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja pengelolaan pariwisata cagar budaya berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi pengelola pariwisata cagar budaya berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep pembangunan masyarakat khususnya pembangunan (*Community Based Tourism*) sebagai mata kuliah Kebijakan Publik.



#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya untuk tetap menjaga dan melestarikan benteng madang. Dengan adanya Benteng madang ini pihak pengelola bersifat bijak dan juga diharapkan agar tetap bias merawat dan mempertahankan yang sudah ada.

#### 1.5. Definisi Konseptual

Untuk memperoleh kejelasan dalam penelitian ini, disamping memberi kejelasan dan arah bagi jalannya penelitian. Definisi konseptual merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dari konsep atau istilah tersebut. Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

##### 1. Pengelolaan

Pengelolaan sering kali di kaitkan dengan kebijakan. Kebijakan adalah suatu tindakan atau peraturan dimana kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang tertulis berupa Undang-undang Dasar. Menurut Eystone (1971:18) yang merumuskan tentang kebijakan public yaitu *“the relationship of government unit to its environment”* (antara hubungan dengan langsung di antara unit atau suatu pemerintahan dengan lingkungannya).<sup>9</sup>

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengelolaan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan di perlukan penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Sedangkan menurut Soekanto, pengelolaan adalah suatu proses yang di

---

<sup>9</sup> Solichin, Abdul Wahab. 2012. *Analisa Kebijakan Jakarta* : PT Bumi Aksara

mulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Terwujudnya manusia sebagai pengelola lingkungan hidup menjadi harapan kita semua agar kelestarian lingkungan dapat serasi dan seimbang sesuai dengan peruntukannya. Disini dibutuhkan peran semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat agar berperan dan berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan hidup.

## **2.Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Pariwisata Berbasis Masyarakat merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal.<sup>10</sup> Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat bermakna bahwa manajemen pariwisata ditempat bersangkutan dikelola oleh masyarakat setempat, ini meliputi pengelolaan kepariwisataan secara menyeluruh dilokasi tersebut, termasuk penyiapan semua produk/pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan.

Dengan cara demikian memungkinkan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan untuk masyarakat setempat, serta menempatkan mereka sebagai subyek kegiatan kepariwisataan bukan sebagai obyek. Yaman & Mohd (2004) dalam Nurhidayati (2012) mengemukakan beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu :

Adanya dukungan pemerintah CBT membutuhkan dukungan struktur yang multi institusional agar sukses dan berkelanjutan. Pendekatan CBT berorientasi pada manusia

---

<sup>10</sup> Nurhidayati, Sri Endah & Fandeli, Chafid. 2012. *Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu, Jawa Timur*. Jurnal Jejaring Administrasi Publik. Th.IV. Nomor 1. Januari-Juni 2012

yang mendukung pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung pemberantasan kemiskinan dengan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga sumber daya alam dan Budaya. Pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator, coordinator atau badan penasehat SDM dan penguatan kelembagaan.

Partisipasi dari stakeholder CBT didiskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konservasi sumber daya juga dimaksudkan sebagai upaya melindungi dalam hal memperbaiki mata pencaharian/penghidupan masyarakat. Pariwisata Berbasis Masyarakat secara umum bertujuan untuk penganekaragaman industri, peningkatan partisipasi yang lebih luas ini termasuk partisipasi dalam sektor informal, hak dan hubungan langsung dan tidak langsung dari sektor lainnya. Pariwisata berperan dalam pembangunan internal dan mendorong pembangunan aktivitas ekonomi yang lain seperti industri jasa dan lainnya. Anggota masyarakat dengan kemampuan kewirausahaan dapat menentukan/membuat kontak bisnis dengan tour operator, travel agent untuk memulia bisnis baru.<sup>11</sup>

Pembagian keuntungan yang adil Tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha disektor pariwisata tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha. Keuntungan tidak langsung yang diterima masyarakat dari kegiatan pariwisata jauh lebih luas antara lain berupa proyek pembangunan yang bisa dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata.

---

<sup>11</sup>Solichin, Abdul Wahab 2012. *Analisa Kebijakan Jakarta* : PT Bumi Aksara

Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan Salah satu kekuatan pariwisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat. Dimana asset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan. Hal ini bisa menumbuhkan kepedulian, penghargaan diri sendiri dan kebanggaan pada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian sumber daya yang ada menjadi lebih meningkat nilai, harga dan menjadi alasan mengapa pengunjung ingin datang ke desa tersebut.

Penguatan institusi lokal Pada awalnya peluang usaha pariwisata di daerah pedesaan sulit diatur oleh lembaga yang ada. Penting untuk melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya dan pengunjung. Hal ini jelas membutuhkan perkembangan kelembagaan yang ada di desa tersebut, yang paling baik adalah terbentuk lembaga dengan pimpinan yang dapat diterima semua anggota masyarakat. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan individu dengan keterampilan kerja yang diperlukan (teknik, managerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan dan pengalaman organisasi. Penguatan kelembagaan dapat berbentuk forum, perwakilan dan manajemen komite.<sup>12</sup>

Pariwisata Berbasis Masyarakat merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan,

---

<sup>12</sup>Nurhidayati, Sri Endah & Fandeli, Chafid. 2012. Op.Cit

inisiatif dan peluang masyarakat lokal.<sup>13</sup> Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat bermakna bahwa manajemen pariwisata ditempat bersangkutan dikelola oleh masyarakat setempat, ini meliputi pengelolaan kepariwisataan secara menyeluruh dilokasi tersebut, termasuk penyiapan semua produk/pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan.

Dengan cara demikian memungkinkan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan untuk masyarakat setempat, serta menempatkan mereka sebagai subyek kegiatan kepariwisataan bukan sebagai obyek. Yaman & Mohd dalam Nurhidayati mengemukakan beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT (*Community Based Tourism*) yaitu :

Adanya dukungan pemerintah CBT (*Community Based Tourism*) membutuhkan dukungan struktur yang multi instutisional agar sukses dan berkelanjutan. Pendekatan CBT (*Community Based Tourism*) berorientasi pada manusia yang mendukung pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung pemberantasan kemiskinan dengan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga sumber daya alam dan Budaya. Pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator, coordinator atau badan penasehat SDM (*Sumber Daya Manusia*) dan penguatan kelembagaan.

Partisipasi dari stakeholder CBT (*Community Based Tourism*) didiskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konservasi sumber daya juga dimaksudkan

---

<sup>13</sup> Suansri, P. 2003. *Comunity Based Tourism Handbook*. Bangkok, Thailand: Responsible Ecological Social Tours(REST) Project

sebagai upaya melindungi dalam hal memperbaiki mata pencaharian/penghidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Pariwisata Berbasis Masyarakat secara umum bertujuan untuk penganekaragaman industri, peningkatan partisipasi yang lebih luas ini termasuk partisipasi dalam sektor informal, hak dan hubungan langsung dan tidak langsung dari sektor lainnya. Pariwisata berperan dalam pembangunan internal dan mendorong pembangunan aktivitas ekonomi yang lain seperti industri jasa dan lainnya. Anggota masyarakat dengan kemampuan kewirausahaan dapat menentukan/membuat kontak bisnis dengan tour operator, travel agent untuk memulia bisnis baru

Pembagian keuntungan yang adil tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha disektor pariwisata tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha. Keuntungan tidak langsung yang diterima masyarakat dari kegiatan pariwisata jauh lebih luas antara lain berupa proyek pembangunan yang bisa dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata.

Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan Salah satu kekuatan pariwisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat. Dimana aset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan. Hal ini bisa menumbuhkan kepedulian, penghargaan diri sendiri dan kebanggaan pada seluruh

---

<sup>14</sup> Suansri, P. 2003. Ibid.

anggota masyarakat.<sup>15</sup> Dengan demikian sumber daya yang ada menjadi lebih meningkat nilai, harga dan menjadi alasan mengapa pengunjung ingin datang ke desa tersebut.

Penguatan institusi lokal Pada awalnya peluang usaha pariwisata di daerah pedesaan sulit diatur oleh lembaga yang ada. Penting untuk melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya dan pengunjung. Hal ini jelas membutuhkan perkembangan kelembagaan yang ada di desa tersebut, yang paling baik adalah terbentuk lembaga dengan pimpinan yang dapat diterima semua anggota masyarakat. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan individu dengan keterampilan kerja yang diperlukan (teknik, managerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan dan pengalaman organisasi. Penguatan kelembagaan dapat berbentuk forum, perwakilan dan manajemen komite.<sup>16</sup>

## **2. Pariwisata Cagar Budaya**

Budaya sendiri juga dikenal dengan istilah *cultural diversity* dan ini sudah menjadi sebuah keniscayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Di Negara ini pula, keragaman budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak lagi keberadaannya. Ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras, daerah dan juga kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan, di dalam bidang pariwisata, potensi dari adanya keragaman budaya tersebut tentu saja sangat cocok dan menarik untuk

---

<sup>15</sup> Suansri, P. 2003. Ibid

<sup>16</sup> Rahardjo, Supratikno. 2013. *Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya*. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013

dijadikan sebagai sebuah objek dan tujuan dari pariwisata yang ada di Negara ini. Dan sudah pasti ini bisa meningkatkan adanya devisa Negara.

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial budaya, alam, dan ilmu. Kawasan cagar budaya merupakan konsep baru yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perhatian terhadap kawasan sebagai salah satu jenis cagar budaya membawa konsekuensi pada cara-cara pelestarian yang tidak hanya terpusat pada peninggalan purbakalanya, tetapi juga harus memperhatikan unsur lingkungan fisik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kawasan cagar budaya tersebut.

#### **1.6. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah menyatakan bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang menunjukkan konsep yang dimaksud. Definisi operasional perlu menetapkan gejala bentuk atau indikator lainnya, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan dapat diolah dengan baik.

Adapun indikator yang berhubungan dengan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) adalah sebagai berikut:

- 1) Planning (perencanaan)
  - Identifikasi Benteng Madang sebagai wisata cagar budaya
  - Persiapan SDM dalam Pengelolaan Cagar Budaya Benteng Madang
- 2) Organizing (pengorganisasian)
  - Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya Benteng Madang



### 3) Actuating (Penggerakan)

- Koordinasi Antar Unsur Stakeholder

### 4) Controlling (Pengawasan)

- Evaluasi Permasalahan dalam Pengelolaan Cagar Budaya Benteng Madang.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklarifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) objek yang diteliti.<sup>17</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu melaporkan objek penelitian dengan cara memaparkan dan menggambarkan keadaan sesuai dengan kenyataan yang ditemui dan tidak bermaksud untuk mengubah kesimpulan yang berlaku. Maksud utama dari penelitian deskriptif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang karakteristik dari objek, kelompok objek Lembaga atau instansi.

### 2. Sumber Data

Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data dibedakan berdasarkan sumbernya menjadi data primer dan data sekunder. Dengan demikian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber penelitian.

Data tersebut dapat berupa data (*catatan*) penelitian dari hasil observasi dan data hasil

---

<sup>17</sup> Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

wawancara langsung dengan subyek penelitian. Dalam memperoleh data primer, penyusun sengaja menentukan orang-orang yang memberikan informasi dengan pertimbangan narasumber yang memberikan informasi itu berkualitas dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, data primer juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala atau staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian diambil dari buku-buku, internet, dokumen dan informasi lain yang terkait dengan subyek penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sangat penting untuk menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dari dekat objek peneliti secara langsung untuk memperoleh gambaran dari penelitian secara konkrit.

Dengan pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat, memperhatikan dan mendengarkan suatu fenomena dimana kejadian itu berada dalam penelitian ini, hal-hal yang akan diobservasi adalah mengenai kebijakan atau menganalisis pengelolaan pariwisata

berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi dari pihak yang terkait.

Observasi dilakukan di tempat langsung pada tempat, instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan pengelolaan objek wisata. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan wawancara data yang diperoleh akan semakin akurat. Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan penelitian. Dimana, pengambilan data dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*). Dengan demikian di dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan *interview guide* untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Sehingga nantinya dalam *interview guide* akan mengajukan berbagai pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan pada intergovernmental. Adapun orang-orang yang akan di wawancarai yaitu kepala desa dan sebagian pihak pengelola pariwisata berbasis masyarakat di kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena dengan wawancara bersama kepala Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selain data lebih akurat juga memiliki kewenangan untuk menjaga Wisata Benteng Madang.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data tidak hanya diperoleh dari observasi dan wawancara, namun data keduanya akan di perkuat oleh dokumen. Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku agenda kunjungan wisatawan, notulen rapat dan sebagainya. Untuk mencari hal-hal yang bebas atau belum di temukan dalam variabel maka peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. Dokumen-dokumen lainnya yang mendukung dalam penelitian ini adalah undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

**4. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah orang yang di dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar belakang penelitian. Karena sebagai subyek yang mampu memberikan informasi, maka dalam penelitian harus memperhatikan dalam menentukan informasi agar di dapatkan informasi yang lengkap dan mendalam.

- a. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- b. Kepala Desa Madang
- c. Juru pelaksana Benteng Madang

**5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan di lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jalan Melati No 17 Kecamatan Kandangan. Hal tersebut karena wisata sejarah dan wisata alam tersebut masih mencakup wilayah Desa Madang,Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## 6. Analisa Data

Dalam melakukan Analisa data ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengumpul data kemudian dilaukan analisis secara kritis, karena proses menganalisis data baik data primer maupun data sekunder merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, yang bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>18</sup> Data yang terkumpul akan membantu dalam memahami dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maa langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dari Miles dan Huberman yang membagi dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dapat menyeleksi data lapangan sesuai dengan apa yang telah diperoleh dari narasumber, dengan tujuan agar peneliti dapat menyelesi data yang ada dilapangan. Pada tahap pertama analisis data ini, peneliti akan menyelesi data yang baik itu bersifat primer dan data sekunder, tentu keduanya sangat dibutuhkan dalam bentuk wawancara ataupun dalam bentu dokumen yang didapat dari instansi, data akan di pilah berdasarkan narasumber untuk memudahkan dalam penyajian dan menganalisa data. Reduksi data bertujuan agar informasi bersifat valid dengan cara memilih data dari narasumber.

---

<sup>18</sup> Sugiono. 2007. Ibid

b. Display Data

Display data dengan tujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan dalam penyajian informasi dengan bentuk teks dan hasil teks akan di proses dengan Analisa uraian, bagan, hubungan antara kategori dengan melihat realitas dilapangan dan hubungan dengan rumusan masalah.

Tahap display data ini, peneliti akan melakukan analisa terhadap masalah dengan melihat kembali kerangka teori yang digunakan pada tinjauan pustaka, pemilihan teori ini bertujuan untuk menganalisa rumusan masalah, hasil analisa ini kemudian dinarasikan dalam bentuk uraian atau bagan pada bab IV pembahasan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan sebagai hasil dari Analisa yang telah di temui di lapangan, dengan begitu peneliti dapat memunculkan satu kesimpulan dengan jawaban baru bagaimana pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Penarikan kesimpulan sebagai baian dari pembahasan yang melalui rumusan masalah dan serangkaian observasi dan wawancara dilapangan mengenai pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*).